

EDISI : Selasa, 23 April 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Delapan Siswa Tunarungu dan Tunawicara SLBN 1 Ikuti UNKP

Singaraja (Bali Post) -

Delapan orang siswa kelas IX SLB Negeri Buleleng mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP), Senin (22/4) kemarin. Mereka merupakan siswa tunarungu dan tunawicara. Satu di antara peserta ujian ini adalah Putri Laksmi, peraih medali perunggu Pekan Paralimpic Provinsi (Peparprov) Bali 2018.

Ujian dimulai pukul 10.30 wita dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. UNKP itu diawali pengisian daft-

tar absen, guru pengawas di sekolah bersangkutan membuka lembar soal yang masih tersegel. Sekitar pukul 11.00 Wita, siswa SLB mulai mengerjakan soal dengan serius.

Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Wayan Cirtha mengatakan, sebelum mengikuti ujian, anak didiknya sudah melakukan pengayaan soal-soal dengan baik. Melihat kesiapan itu, Cirtha optimis siswa yang mengalami cacat fisik itu mengerjakan ujian dengan nilai memuaskan.

"Persiapan biasa saja dan

sebelumnya kami sudah melakukan pengayaan, sehingga kami yakin anak-anak kami mendapat hasil maksimal," ujar Cirtha.

Sekretaris Disdikpora, Made Astika mengatakan, khusus peserta UNKP SMP diikuti sebanyak 5.528 siswa. Dari daftar siswa peserta ujian itu, 33 anak tidak hadir pada ujian hari pertama. Rinciannya 29 orang berhenti, 3 anak sakit, dan 1 siswa tanpa keterangan.

Untuk UNBK jenjang SMP diikuti sebanyak 6.025. Dari jumlah itu sebanyak 21 orang dinyatakan tidak hadir. Rinciannya, berhenti sekolah 14 siswa, 1 izin karena menjadi utusan seni ke Tiongkok dan 6 siswa sakit. "Sedangkan USBN SD/Mi total peserta ujian sebanyak 11.989 orang. Dari jumlah itu sebanyak 12 orang dinyatakan tidak hadir. Rinciannya sebanyak 5 orang dinyatakan berhenti, mutasi 2 orang, sakit 2 orang, izin 2 orang dan tanpa keterangan 1 orang. "Secara umum hari pertama UN tidak ada kendala, baik jaringan internet, listrik juga tidak ada gangguan," katanya. (kmb38)



Bali Post/kmb38

UNKP - Delapan siswa SLB Negeri 1 Buleleng mengikuti UNKP, Senin (22/4) kemarin.

Jaga Warisan Kuno Janger Menyali Melalui Kompetisi Anak-anak SMP

Melestarikan kesenian yang nyaris punah, memang perlu usaha keras dan juga desain sistematis sejak dini. Seperti itulah strategi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Buleleng dalam usaha menjaga warisan Tari Janger kuno itu. Bahkan, secara tegas mengangkat tema "Regenerasi Janger Menyali" dengan melibatkan delapan sekaa janger SMP di Buleleng berkompetisi kreatif, menonjolkan koreografi yang apik. Lomba itu dimulai Minggu (21/4) sampai Senin (22/4) kemarin. Lalu, seperti apa cara-cara sistematis yang didesain dalam upaya sosialisasi dan pengembangan Tari Janger Menyali itu?

LOMBA yang digulirkan bukan saja dalam upaya edukasi, juga penggalian bahkan pelestarian warisan Tari Janger Menyali. Desain sistematis harus dilakukan karena keberadaan Tari Janger Menyali yang memiliki keunikan khusus itu terancam punah akibat kreasi janger dari daerah lain dan kesenian modern yang demikian masif belakangan ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Gede Dharmaja, M.Si., mengatakan, lomba janger ini digelar serangkaian Pekan Apresiasi Seni (PAS) HUT ke-415 Kota Singaraja. Kenapa Janger Menyali ini dipilih, karena kesenian ini kondisinya sudah terancam punah. Hal itu disebabkan kalah bersaing dengan janger kreasi dari daerah lain dan kesenian modern. Pada masa kejayaannya, Janger Menyali ini memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan janger dari Bali Selatan. Perbedaan itu mulai dari kostum, gending, dan lakon yang dipentaskan. Per-

bedaan antara Janger Menyali dengan janger lainnya adalah kostum penari laki-lakinya disebut jipak. Penari laki-laki ini mengenakan kostum seperti pakaian tentara lengkap dengan baretnya. Sedangkan, penari wanita yang biasa disebut Perik, pakaiannya hampir sama dengan janger pada umumnya.

Melihat kondisi Janger Menyali yang tinggal generasi keempat itu saat ini, penarinya sudah lanjut usia. Karena itu, Disdikpora mengenalkan kesenian langka ini kepada generasi muda melalui lomba. Pihaknya ingin ada usaha penggalian dan pelestarian lebih sistematis, sehingga Janger Menyali ini tetap lestari dan bersaing eksis dengan janger dari Bali Selatan.

"Kita mengawali lomba ini. Harapannya setelah dikenal kemudian ada penggalian, sehingga tari ini bukan saja lestari, namun berkembang dan bersaing," katanya.

Pada hari pertama, sekaa janger tampil masing-masing

dari SMPN 4 Singaraja, SMPN 2 Banjar, SMPN 2 Seririt, dan SMPN 1 Singaraja. Sedangkan pada hari kedua, Senin (22/4) kemarin, tampil sekaa janger SMPN 2 Sawan, SMPN 1 Gerokgak, SMPN 1 Sukasada, dan SMPN 2 Busungbiu.

Dewan juri yang merupakan akademisi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar menentukan kriteria penilaian meliputi penampilan, kekompakan, kreativitas, dan koreografi. Setiap sekaa diberikan kesempatan pentas minimal 20 menit dan maksimal 35 menit.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, lomba janger ini merupakan upaya positif dalam hal pelestarian tari janger di daerahnya. Pelestarian ini penting karena Tari Janger Menyali ini keberadaannya hampir punah. Pihaknya berharap lomba ini menambah khazanah kesenian asli Bali Utara. "Tahun depan, kami kembali gelar bahkan akan melibatkan peserta siswa SMA dan SMK," katanya. (mud)

Nama Media :

BALI POST

Kategori :

LKPJ

Proyek RTH Taman Bung Karno Jadi Catatan LKPJ APBD 2018

Singaraja (Bali Post) -

Setelah disibukkan tahapan pemilihan umum (pemilu), DPRD Buleleng sekarang disibukkan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Buleleng 2018. Rapat gabungan komisi-komisi itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Wirsana.

Dalam pembahasan awal, Senin (22/4) kemarin, dewan mulai menyepakati beberapa poin yang dijadikan catatan dalam rekomendasi LKPJ APBD 2018. Dari beberapa poin rekomendasi itu, dewan memasukkan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kecamatan Sukasada menjadi poin rekomendasi. Meskipun proyek itu mandek, dewan mendesak agar pemerintah daerah melanjutkan proyek itu pada tahun anggaran 2019.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, proyek RTH Taman Bung Karno itu sudah ditunggu masyarakat sebagai ikon Buleleng. Proyek RTH itu memiliki relasi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sayangnya, pada tahun 2018 lalu, proyek RTH itu tidak bisa digarap tuntas. Bahkan, Dinas Perumahan Permukiman

Pertanahan (Perkimta) Buleleng telah memutuskan kontrak pelaksanaan proyek tersebut. "Kita ketahui bersama kalau RTH Taman Bung Karno itu mandek. Kontrak pekerjaannya diputus tahun 2018 lalu. Khususnya kami di Komisi II memasukkan perjalanan proyek itu dalam catatan rekomendasi terhadap LKPJ APBD Buleleng 2018," katanya.

Selain dijadikan catatan penting, politisi PDI-P asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini mendesak pemerintah daerah tahun ini untuk menuntaskan proyek yang sudah ditunggu-tunggu publik di Buleleng itu. Al-

sannya, karena RTH Taman Bung Karno itu sudah masuk perencanaan pembangunan yang disepakati bersama dewan. Kalau proyeknya tidak digarap tuntas, Budiasa khawatir pelaksanaan proyek itu justru menjadi preseden buruk citra pemerintah oleh masyarakat Buleleng. "Kami tidak mengerti soal teknis proyek dan menyangkut patung Bung Karno itu berkaitan bidang seni. Namun apa pun itu, karena sudah masuk perencanaan pembangunan, maka kami menyepakati tahun ini, proyek itu kami harap dituntaskan, sehingga tidak memunculkan preseden

buruk di masyarakat kita," jelasnya.

Selain proyek RTH Taman Bung Karno, mantan Perbekel Desa Selat, Kecamatan Sukasada itu menyoroti realisasi dana hibah bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan bedah rumah yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung. Dia menyarankan pada proses penyerahan BKK berikutnya, diusulkan agar ada analisis yang kuat terhadap warga yang menjadi sasaran BKK itu. Ini penting karena dari realisasi bedah rumah itu muncul kesan di masyarakat kalau penerimanya adalah warga yang dari kemampuan ekonomi sudah mapan. Namun justru, mereka itu dimasukkan sebagai penerima bedah rumah.

"Ada kesan masyarakat yang justru lebih layak menerima malah mereka tidak dapat. Saya kira ke depan, perlu dicermati sebelum realisasi ada verifikasi dan penerima agar benar-benar mereka yang layak menerima bantuan bedah rumah itu," jelasnya.

Rencananya, DPRD Buleleng menggelar sidang paripurna Selasa (23/4) ini untuk membacakan poin rekomendasi dewan terhadap LKPJ APBD Buleleng Tahun 2019. (kmb38)



Bali Post/kmb38

BAHAS LKPJ - DPRD Buleleng membahas LKPJ APBD Buleleng Tahun 2018 di gedung dewan Senin (22/4) kemarin.

Media : *BALI POST*

Kategori : *TUI*

Pembukaan Pendidikan Calon Tamtama

Singaraja (Bali Post) -

Sebanyak 375 siswa calon Tamtama TNI-AD mengikuti pembukaan masa pendidikan di lapangan Candradimuka Secata Rindam IX/Udayana, Senin (22/4) kemarin. Apel pembukaan pendidikan ini dihadiri Danrindam IX/Udayana Kolonel Inf. Esy Suharto, S.Sos. didampingi para pejabat di lingkungan Kodam IX/Udayana. Membacakan sambutan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., Danrindam Kolonel Inf. Esy Suharto, S.Sos. mengatakan ratusan siswa yang berhasil lolos dalam seleksi ketat dan transparan ini menempuh pendidikan lebih dari lima bulan. Ratusan siswa dari berbagai daerah di Indonesia itu mendapat materi pendidikan sesuai kurikulum yang ditentukan komando atas.

Setiap siswa diminta mengikuti semua petunjuk dan perintah pelatih, sehingga tujuan pendidikan baik fisik maupun pembentukan mental dan teknik dasar keprajuritan dapat tercapai. Keberhasilan pendidikan dasar ini akan menentukan kualitas calon prajurit yang tangguh dan profesional. (kmb38)



Bali Post/kmb38

PEMBUKAAN PENDIDIKAN - 375 siswa calon Tamtama TNI-AD mengikuti pembukaan masa pendidikan di lapangan Candradimuka Secata Rindam IX/Udayana, Senin (22/4) kemarin.

Nama Media : BALI POST

Kategori : MONEY POLITICS

Bawaslu Tangani Dugaan "Money Politics"

Singaraja (Bali Post) -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng menangani dugaan kasus *money politics* oknum calon legislatif (caleg) DPRD Bali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Buleleng. Kasus ini diduga terjadi di Dusun Munduk Uwaban Desa Pedawa, Banjar. Uniknya, dugaan kasus ini dilaporkan oleh pihak penerima uang Nyoman Redana. Dia lebih awal melaporkan kasus itu karena takut kalau nanti ada pihak yang mengadukan ke Bawaslu. Selain pelapor, saksi yang juga menerima uang langsung dimintai keterangan. Mereka itu yakni Gede Muliawan, Putu Jaya dan Made Nurai.

Warga penerima dugaan *money politics*, Nyoman Redana, menceritakan kasus ini berawal pada 15 April 2019, dia disuruh mengambil uang dari salah seorang tim sukses (timses) oknum caleg bersangkutan. Transaksi itu dilakukan di hotel yang tidak diketahui alamat persisnya. Dia mengetahui kalau lokasi pertemuan dengan pemberi uang itu di salah satu hotel di Lovina. Saat itu, Redana diberi uang Rp 5 juta oleh anggota timses yang dikenal SB yang diketahuinya berasal dari Banjar Tegaha, Kecamatan Banjar. Selain memberi uang, timses itu juga memberikan kartu nama dan contoh surat suara. "Saya diminta mengambil uang di Lovina Rp 5 juta. Dan ada kartu nama dan contoh surat suara. Saya tidak tahu nama lengkap timsesnya," katanya.

Setelah menerima uang dari timses itu, kata Redana, pada 16 April 2019, dirinya kemudian memberikan uang Rp 100.000 kepada warga yang bersedia memilih caleg sesuai di

kartu nama tersebut. Dari pembagian itu, dia hanya mendapat pemilih 10 orang. Setiap orang itu kemudian diberi uang Rp 100.000, sehingga dana itu berhasil dibagikan Rp 1 juta. Sedangkan, sisanya, Rp 4 juta, maunya dibagikan untuk warga lainnya, namun tidak berhasil. Bahkan, uang Rp 3.500.000 habis digunakan biaya operasional mencari suara. Sedangkan sisanya Rp 500.000 langsung diserahkan ke Bawaslu sambil mengadukan kasus tersebut. "Saya bagikan untuk sepuluh orang. Maunya cari pemilih lagi namun tidak berhasil dan saya menghabiskan biaya Rp 3.500.000. Sisanya, hanya Rp 500.000 dan karena takut ada yang melaporkan, lebih awal saya sampaikan kejadian ini ke Bawaslu," jelasnya.

Dugaan "Money Politics"

Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana membenarkan pihaknya menerima laporan dugaan *money politics* itu. Dia mengatakan, sesuai mekanisme, Bawaslu melaku-

kan penanganan kasus selama 14 hari kerja, sebelum dikeluarkan keputusan nantinya. Dari penanganan awal, saksi pelapor bersama warga penerima uang sudah diklarifikasi. Keterangan sementara pelapor Redana menyebutkan telah menerima uang Rp 5 juta dari terlapor SB. Uang itu diserahkan terlapor kepada saksi pelapor di hotel yang diketahui berada di *traffic light* Lovina ke utara. Saat menyerahkan uang itu, pelapor ditugaskan mencari suara untuk caleg yang tercantum dalam contoh surat suara dan kartu nama itu. Pelapor juga mengakui kalau menggunakan dana itu Rp 3.500.000 dan sisanya, Rp 500.000, diserahkan sebagai barang bukti bersama contoh surat suara dan kartu nama caleg bersangkutan. "Benar, kami menerima laporan dari pelapor. Kami sudah melakukan klarifikasi pelapor dan saksi. Pada inti, laporan pelapor itu diberi uang oleh terlapor untuk mencari suara

pilig. Kami akan segera meminta klarifikasi terlapor, namun karena alamat pastinya tidak diketahui, kami koordinasikan dulu ke PPK untuk mengirimkan surat undangan klarifikasi itu," katanya.

Apakah laporan itu memenuhi unsur *money politics*? Akademisi Universitas Panji Sakti (Unipas) ini belum memberikan tanggapan detail. Yang jelas, sesuai regulasi dugaan *money politics* itu harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan. Unsur itu seperti dilakukan pada masa tenang atau sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara. Kalau nantinya memenuhi unsur, Bawaslu akan menjerat pelanggaran ini dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Demikian juga, klarifikasi kepada caleg yang disebutkan "membeli" suara, Sugi Ardana mengatakan, Bawaslu masih fokus untuk mengklarifikasi terlapor dan tambahan saksi-saksi lainnya. Ini karena sesuai laporan yang diterima, bahwa pelapor menerima uang dari SB untuk mencari suara pilig. "Sementara kita tangani dari pemberi dan penerima serta saksi-saksi tambahan," tegasnya. (kmb38)